

---

## **Kajian Literatur : Strategi Tata Kelola Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dalam Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Pesisir**

### ***Literature Review: Strategy for Managing Coastal Community Economic Empowerment Programs in Improving Coastal Public Health***

**Dina Anggreini, Susilawati**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : [dinaanggreini31@gmail.com](mailto:dinaanggreini31@gmail.com)

---

#### **ABSTRAK**

Di Indonesia, pemberdayaan masyarakat telah berkembang menjadi program pemerintah dan dunia usaha nasional. Pendekatan utama terhadap ide pemberdayaan adalah bahwa masyarakat pesisir harus menjadi fokus dari upaya pembangunannya terutama dalam peningkatan taraf hidup dari segi ekonomi dan kesehatan daripada dimanfaatkan sebagai objek dari berbagai program pembangunan. Tujuan : untuk mengetahui strategi tata kelola program ekonomi masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesehatan masyarakat pesisir. Desain : penelitian menggunakan desain naratif deskriptif. Jenis Penelitian : penelitian ini menggunakan *Systematic Literature Review* (SLR). Pengumpulan Data : penelitian bersumber dari database publikasi *Google Scholar*, *Research Gate*, dan *Tandfonline* dengan kata kunci "Pola Ekonomi Masyarakat Pesisir" "Pemberdayaan Masyarakat Pesisir" dan "Peran Ekonomi Terhadap Kesehatan Masyarakat Pesisir" sehingga mendapatkan 3 jurnal internasional dan 7 jurnal nasional yang sudah diteliti sebelumnya. Hasil : pemberdayaan ekonomi harus dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir, dengan cara pengelolaan dan pemerintah harus mampu berkolaborasi dalam mengkoordinasikan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pengelolaan kawasan pesisir. Simpulan : masyarakat pesisir masih sulit untuk melepaskan diri dari kemiskinan yang menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya kesehatan. Adapun hal kecil yang dapat dilakukan masyarakat pesisir dalam mengelola ekonomi kawasannya sebagai wujud dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan kesehatan antara lain dengan cara : melakukan produk inovasi makanan, pembuatan rest area, budidaya mutiara, pengelolaan sumber daya perikanan, dan adanya wisata pantai.

**Kata Kunci : Pemberdayaan, masyarakat pesisir, ekonomi, kesehatan**

---

#### **ABSTRACT**

*In Indonesia, community empowerment has developed into a national government and business program. The main approach to the idea of empowerment is that coastal communities must be the focus of their development efforts, especially in increasing their standard of living from an economic and health perspective rather than being used as objects of various development programs. Objective: to determine the management strategy of coastal community economic programs in improving the health of coastal communities. Design: research using descriptive narrative design. Type of Research: this research uses Systematic Literature Review (SLR). Data Collection: research sourced from the Google Scholar publication database, Research Gate, and Tandfonline with the keywords "Economic Patterns of Coastal Communities" "Empowerment of Coastal Communities" and "The Role of Economics in Coastal Community Health" so that 3 international journals and 7 national*

---

*journals have been published. previously researched Results: economic empowerment must be able to improve the standard of living of coastal communities, by means of management and the government must be able to collaborate in coordinating the planning, utilization, supervision and control of cross-sectoral coastal resources and management of coastal areas. Conclusion: it is still difficult for coastal communities to escape from poverty which causes various problems, one of which is health. There are small things that can be done by coastal communities in managing their regional economy as a form of meeting their needs for life and health, among others by: implementing food innovation products, making rest areas, cultivating pearls, managing fishery resources, and having beach tourism.*

**Keywords : Empowerment, coastal societies, economy, health**

---

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki persoalan yang lebih kompleks terhadap potensi sumber daya pesisir sehingga permasalahan terhadap kesejahteraan manusia menjadi krusial. Kawasan pesisir memiliki tujuan strategis karena merupakan titik temu daratan dan perairan, dimana kekayaan sumber daya alam dan lingkungan tersedia secara potensial. Menurut Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwa : “Kekayaan alam yang ada di bumi Indonesia dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat” dan “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir telah lama dieksploitasi untuk tujuan konstruksi, sosial, dan komersial. Selain pertumbuhan penduduk yang cepat, pemukiman dan kegiatan masyarakat lainnya semakin padat di wilayah pesisir. Mayoritas masyarakat pesisir akan berpartisipasi dalam kegiatan perikanan yang dimulai dengan penangkapan ikan, budidaya, dan pengolahan hasil laut (Suryani, 2019).

Menurut (Sutarto, 2018) pemberdayaan merupakan komponen paradigma pembangunan yang memperhatikan secara seksama semua komponen utama bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya, mulai dari yang bersifat intelektual (sumber daya manusia) sampai yang material dan fisik sampai yang bersifat manajerial. Menurut (Suharto, 2017) berpendapat bahwa tujuan utama pemberdayaan adalah “memperkuat kekuatan masyarakat, terutama kelompok lemah yang mengalami ketidakberdayaan karena kondisi internal (seperti persepsi mereka sendiri) maupun karena kondisi eksternal (misalnya tertindas) oleh struktur sosial yang tidak adil.

Di Indonesia, pemberdayaan masyarakat telah berkembang menjadi program pemerintah dan dunia usaha nasional. Pendekatan utama terhadap ide pemberdayaan adalah bahwa masyarakat harus menjadi fokus dari upaya pembangunannya sendiri daripada dimanfaatkan sebagai objek dari berbagai program pembangunan. Pemberdayaan masyarakat pesisir harus bersifat *bottom-up* dan inklusif. Fokus pemberdayaan masyarakat pesisir harus pada pemaksimalan potensi masyarakat setempat. Sasaran pemberdayaan masyarakat di desa pesisir hendaknya lebih dititikberatkan pada potensi yang dimiliki masing-masing desa. Sayangnya, potensi yang sangat besar ini belum sepenuhnya terealisasi sehingga desa-desa pesisir Indonesia dalam keadaan tidak sejahtera dan kondisi fisik yang memprihatinkan (Iswari et al., 2019).

Wilayah pesisir memiliki potensi untuk mengembangkan berbagai sumberdaya, antara lain sumberdaya hayati, sumberdaya mineral dan energi, industri dan jasa maritim, transportasi laut, jasa lingkungan, dan lain-lain. Menurut pernyataan dari (Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2016) sumber daya ikan laut Indonesia memiliki potensi lestari sebesar 6,5 juta ton per tahun, sedangkan potensi ekonomi sumber daya kelautan dan perikanan yang dapat digunakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dinilai di Amerika Serikat sebesar \$82 miliar per tahun. Sementara menurut hasil penelitian BPPT (1998 dalam Kusmasto, 2000) 40 dari 60 cekungan minyak yang ditemukan di alam Indonesia berada di laut, atau sekitar 70% dari keseluruhan (Suryani, 2019).

Menurut Pasal 18 ayat (2) dan (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan serta diberikan jumlah terbesar otonomi. Tugas pemerintah daerah adalah melakukan tugas pengelolaan yang menyebarluaskan informasi, keahlian, dan pendidikan tentang pengelolaan usaha perikanan. Sistem ini diantisipasi untuk meningkatkan modal

sosial nelayan dan memberi mereka lebih banyak pengaruh sosial dalam ekonomi yang berdiri sendiri. Karena pemerintah memainkan peran penting dalam membina komunitas nelayan yang lebih mandiri, saran dan pelatihan diperlukan (Sonia & Susilawati, 2022).

Kemiskinan nelayan umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya tingkat pendidikan, peran lembaga ekonomi yang masih belum ideal dalam memberdayakan nelayan, kurangnya perhatian terhadap kepentingan jangka panjang, kepemilikan modal, dan teknologi tradisional. Secara lingkungan, kerusakan wilayah pesisir dan ekosistem karena proses alami dan efek aktivitas manusia menjadi semakin umum. Menurut LIPI, terumbu karang Indonesia yang diteliti oleh para ilmuwan disebut sebagai lautan Amazon, hal ini karena hanya 7% kualitasnya sangat baik dan lebih dari 30% rusak.

Sementara itu, untuk populasi pesisir menghadapi tingkat risiko kesehatan yang signifikan. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2013, sekitar 25% nelayan mengalami gangguan kesehatan pada bulan sebelumnya saat dilakukan survei. Selain itu, hanya 54% nelayan yang memiliki asuransi kesehatan. Banyak dari masalah kesehatan ini adalah hasil dari sanitasi lingkungan yang buruk. Misalnya ketersediaan air bersih di suatu daerah akan mempengaruhi tingkat kesehatan karena air merupakan kebutuhan pokok manusia dan manusia selalu berinteraksi dengan air dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga terkait dengan kondisi ekonomi masyarakat. Kemiskinan individu dan kelompok membuat lebih sulit untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang efektif. Jika seseorang atau masyarakat tersebut miskin, pemenuhan kebutuhan gizi seimbang akan terasa sulit.

Dilihat dari standar kebutuhan hidup yang layak atau pemenuhan kebutuhan pokok, kemiskinan merupakan situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, perumahan, yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum. Namun secara umum, kemiskinan disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, antara lain kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, infrastruktur. Di samping itu, kurangnya kesempatan berusaha, kurangnya akses terhadap informasi, teknologi dan permodalan, budaya dan pengeluaran biaya hidup cenderung boros, menyebabkan kehidupan masyarakat miskin semakin lemah (Palijama, 2022).

Berdasarkan uraian permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian kajian literatur dengan judul "Strategi Tata Kelola Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dalam Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Pesisir" dengan menggunakan jurnal nasional dan internasional yang telah terpublikasi. Adapun tujuan penelitian ini untuk melakukan kajian literatur mengenai strategi tata kelola program ekonomi masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesehatan masyarakat pesisir.

## BAHAN DAN METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah *Systematic Literature Review* (SLR). Penelitian ini dilakukan secara sistematis dan bersumber dari jurnal nasional dan internasional. Penulis melakukan pencarian literatur dengan diskusi secara dua arah untuk penelitian ini. Adapun data yang digunakan dalam penelitian bersumber dari database publikasi ilmiah baik nasional dan internasional seperti *Google Scholar*, *Research Gate*, dan *Tandfonline*.

## HASIL

Berdasarkan hasil pencarian jurnal dari mesin pencarian *Google Scholar*, *Research Gate*, dan *Tandfonline* dengan kata kunci "Pola Ekonomi Masyarakat Pesisir" "Pemberdayaan Masyarakat Pesisir" dan "Peran Ekonomi Terhadap Kesehatan Masyarakat Pesisir" menghasilkan jurnal sebanyak 40 jurnal. Berasal *Google Scholar* sebanyak 25 jurnal, *Research Gate* sebanyak 11 jurnal, dan *Tandfonline* sebanyak 4 jurnal. Literatur kemudian disaring, dengan mempertimbangkan kesesuaian sumber dan isi, melalui pembacaan cepat abstrak, judul, dan subjudul, serta pernyataan dokumen atau kalimat penting yang terdapat dalam abstrak dan pengantar jurnal, serta kondisi literatur, seperti judul tidak sesuai, hanya berupa abstrak, tidak full text, dan literatur tersebut tidak dapat diakses (literatur berbayar). Hasil screening menyisakan 35 literatur. Jurnal dengan judul yang sama yang merupakan review artikel atau opini, review literatur dengan judul yang sama, dan jurnal yang tidak sesuai tujuan

kemudian dihapus untuk mempercepat proses eliminasi jurnal. Dilakukan evaluasi isi jurnal yang objektif baik yang mendukung maupun yang melemahkan, menggunakan *Skimming* (meluncur) dengan maksud membaca fokus pada inti literatur, membaca cepat, dan menangkap intisari jurnal. Namun, *skimming* masih belum dapat menangkap maksud penulis jurnal, maka dilakukanlah pembacaan secara berulang, mendalam dan berfokus pada metode dan hasil penelitian. Sehingga, diperoleh literatur yang sesuai sejumlah 10 literatur yang kemudian dilakukan analisis dan diintegrasikan.

## PEMBAHASAN

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Faoziyah, 2020) tujuan utama dari pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir adalah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat pesisir. Pemberdayaan ekonomi diharapkan sebagai proses perubahan sosial terencana yang bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir, yang dilengkapi dengan proses pembangunan ekonomi yang disertai dengan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat pesisir. Karena sebagai kawasan pengelolaan *multi-stakeholder*, Pemerintah Daerah harus mampu berkolaborasi dalam mengkoordinasikan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumberdaya pesisir lintas sektor, ekosistem darat dan laut, serta ilmu pengetahuan dan pengelolaan (Kristiyanti, 2016).

Sebagaimana disampaikan oleh (Sunantri & Yayan, 2021) dalam penelitiannya, bahwa keterlibatan semua elemen sebagai wujud dari demokrasi partisipatif pengelolaan sumber daya pesisir diharapkan akan mampu mengidentifikasi, mengkodifikasi, dan membagi pengetahuan yang kemudian dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan wilayah pesisir oleh pembuat kebijakan, dalam hal ini Pemerintah Daerah dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengelola sumberdaya wilayah pesisir sehingga akan mengakibatkan kepentingan yang melibatkan pemerintah, sektor, masyarakat pesisir, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha/nelayan di kawasan pesisir.

Selain itu, menurut (Phelan dkk., 2020) dan (Voyer dkk., 2018) pemanfaatan sumber daya laut dan lingkungan pesisir sangat mendukung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kawasan pesisir. Dalam hal ini sering dikenal dengan sebutan “sistem ekonomi biru”. Meskipun persepsi tentang ekonomi biru berbeda-beda, menghasilkan inisiatif penerapan yang beragam, ada kesamaan tertentu. Salah satu kesamaan utama adalah penilaian keuntungan sosial dan ekonomi yang diperoleh dari ekosistem laut yang sehat, mengakui bahwa praktik yang tidak berkelanjutan merendahkan nilai ekonomi dan kesejahteraan manusia. Kesamaan penting lainnya adalah penamaan dan penetapan batas geografis yang lebih besar di lautan, yang pertama kali dibahas oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982. Hal ini sangat penting bagi banyak negara pesisir, terutama SIDS, karena memberikan akses yang lebih besar ke sumber daya laut melalui zona ekonomi eksklusif dan ruang tata kelola. Tentu saja, manfaat yang diperoleh manusia dari lautan sangat signifikan dalam kaitannya dengan ekonomi global. Kesadaran ini telah mengalihkan perdebatan dari melihat ekonomi laut terutama sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, gagasan ekonomi biru telah memperluas perdebatan untuk memasukkan metode untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial sambil secara dramatis menurunkan risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis.

Namun, kembali lagi ke realita awal. Meskipun program dalam pengelolaan ekonomi di kawasan pesisir telah digalakkan, akan tetapi status ekonomi orang tua sebagai faktor risiko terjadinya penyakit seperti *stunting* pada anak masih menjadi permasalahan yang banyak ditemukan di kawasan pesisir. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan gizi balita, pemilihan jenis makanan tambahan dan waktu pemberian makan, serta pola makan yang sehat (Lehan dkk., 2023). Menurut (Raharja dkk., 2019) seseorang dengan posisi sosial ekonomi yang tinggi lebih cenderung memilih dan membeli makanan yang sehat dan beragam. Tingkat sosial ekonomi yang rendah, di sisi lain, dianggap memiliki pengaruh yang kuat terhadap prevalensi *wasting* dan *stunting* pada masa kanak-kanak. Hal ini karena rumah tangga berpendapatan rendah seringkali memilih lauk pauk hewani dan nabati dengan harga terjangkau atau murah berdasarkan kondisi keuangan mereka. Sayuran yang akan lebih sering diolah adalah sayuran yang ditanam di sawah atau ladang dengan sedikit varietas tanaman, sehingga menu harian yang diberikan sederhana dan konsisten. Gangguan

ini menyebabkan asupan makanan balita menjadi kurang beragam sehingga dapat menyebabkan penurunan asupan zat gizi (Millward, 2017).

Untuk dapat menanggulangi permasalahan kesehatan di kawasan pesisir, berikut merupakan beberapa strategi program yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, yaitu :

1. Inovasi produk pesisir berbasis sumber daya alam olahan seperti jagung asli, ubi kayu, ubi jalar, dan siwalan.  
Siwalan (*Borassus Flabellifer L*) merupakan buah yang dapat tumbuh di lingkungan yang cukup panas. Paling dikenal sebagai bahan baku minuman tradisional yang terbuat dari karangan bunganya, yang disadap untuk dibuat getah lontar (legen), tetapi bisa juga direbus menjadi gula. Bagian dalam buah hanya dimanfaatkan secara optimal karena tertutup oleh cangkang/cangkang. Program pemberdayaan ini bertujuan untuk membantu masyarakat setempat dalam mengolah buah siwalan menjadi produk olahan yang bernilai ekonomi, seperti puding, selai, dan manisan yang terbuat dari buah siwalan.
2. Pengembangan pariwisata melalui pembangunan "*Rest Area*"  
Ruang istirahat atau *rest area* melayani berbagai tugas, termasuk menyediakan lokasi istirahat yang aman bagi pengguna jalan nasional dan diproyeksikan dapat mengurangi kecelakaan lalu lintas. Pendopo yang disajikan memiliki berbagai fasilitas seperti tempat parkir, toilet, restoran, tempat ibadah, dan taman. Lebih jauh lagi, dimaksudkan agar kearifan lokal masyarakat pesisir dapat dijadikan sebagai gardu pandang terhadap infrastruktur PUPR yang beragam dengan estetika tinggi dan keindahan lingkungan fisik sekitarnya, yang diharapkan dapat menjadi tujuan wisata baru.
3. Budidaya mutiara  
Pemberdayaan masyarakat pesisir dipandang penting untuk mendorong daya saing dan kualitas budidaya mutiara. Pemberdayaan juga dapat dilakukan dengan membentuk organisasi masyarakat otonom untuk pengolahan mutiara dan menjadi wadah bagi kelompok masyarakat pengolah mutiara. Untuk mendapatkan hasil terbaik, pengetahuan IPTEK serta bantuan kepada kelompok usaha budidaya mutiara perlu diterapkan dengan pendekatan budaya dan kearifan lokal.
4. Sumber daya perikanan  
Sumber daya perikanan merupakan tumpuan hidup sebagian besar masyarakat nelayan dalam meningkatkan taraf ekonominya, dan untuk keluar dari jerat kemiskinan, diperlukan perencanaan dan pembangunan yang terkait langsung dengan pemberdayaan ekonomi.
5. Wisata pantai  
Pantai merupakan salah satu obyek wisata yang banyak diminati sebagai pilihan liburan karena memiliki kearifan lokal tersendiri. Ini dapat digunakan dengan memasukkan wisata pantai ke dalam sebanyak mungkin lokasi pantai. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan olahan hasil laut, kerajinan laut, dan jasa yang mengelilingi saluran air melalui kano atau perahu, antara lain, dengan tetap menjaga kualitas pantai seperti kebersihan, keramahan, dan kearifan lokal.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil *review* yang dilakukan terhadap 7 artikel jurnal nasional maupun 3 artikel jurnal internasional menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir diawali dengan sulitnya masyarakat pesisir untuk melepaskan diri dari kemiskinan yang menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya kesehatan. Selain wilayah pesisir yang jauh dari pusat kota, keterbatasan akses dan sulitnya akses menjadi faktor pendukung bagi desa pesisir yang belum mengalami kemajuan berarti dalam meningkatkan perekonomiannya. Jika tingkat ekonomi masyarakat tidak membaik, maka akan timbul berbagai masalah penyakit seperti stunting yang sering terjadi pada balita dan anak-anak di daerah pesisir karena terbatasnya akses pelayanan kesehatan, ketidakmampuan menyediakan makanan yang cukup gizi, kurangnya kesadaran dan pengetahuan, dan kurangnya

pendidikan. Alhasil, rencana program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir menghadirkan alternatif pembangunan yang tentunya dapat dilakukan oleh masyarakat pesisir bekerja sama dengan pemerintah dan mitra. Kemajuan ekonomi diperkirakan akan meningkatkan taraf hidup di kawasan pesisir, memungkinkan mereka mempertahankan pengetahuan lokal mereka tanpa didominasi oleh perusahaan komersial besar. Untuk itu, dalam mengantisipasi permasalahan tersebut, adapun hal kecil yang dapat dilakukan masyarakat pesisir dalam mengelola ekonomi kawasannya sebagai wujud dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan kesehatan antara lain dengan cara : melakukan produk inovasi makanan, pembuatan rest area, budidaya mutiara, pengelolaan sumber daya perikanan, dan adanya wisata pantai. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya untuk meningkatkan dan menambah ilmu yang bermanfaat bagi dunia kesehatan terkhusus bidang kesehatan masyarakat.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan terselesaikannya artikel ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen yang mengampu mata kuliah ini, yaitu ibu Susilawati, SKM, M.Kes dan kepada almamater tercinta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara terutama pada Fakultas Kesehatan Masyarakat yang menjadi wadah saya dalam menuntut ilmu dan pengetahuan serta teman-teman saya yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Adriyanti, D. T., Putri, T. W. S., Mindaryani, A., Prasetya, A., & Petrus, H. T. B. M. (2023). Community Empowerment Through Sustainable Utilisation Of Mangrove Forests For The Production Of Natural Dyes With An Environmentally Friendly System (Phase I: Increasing Awareness And Knowledge Enhancement). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal Of Community Engagement)*, 9(1), 38. <https://doi.org/10.22146/jpkm.70455>
2. Ahmed, J., Kathambi, B., & Kibugi, R. (2023). Policy Perspective On Governance Standards Setting Using Community Participation For Sustainable Mangrove Management In Lamu Kenya. *International Journal Of Conservation Science*, 14(1), 295–306. <https://doi.org/10.36868/ijcs.2023.01.20>
3. Diba, F., & Anwari, S. (2017). Tumbuhan Mangrove Yang Berpotensi Sebagai Obat Di Kawasan Pt. Kandelial Alam Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Hutan Lestari*, 5(4), 1100–1110.
4. Faoziyah, S. (2020). Intervensi Pengembangan Masyarakat Melalui Model Pengelolaan Pesisir Karangsong Kabupaten Indramayu. *The 2nd International Conference On Social Work Faculty Of Social And Political Sciences University Of Muhammadiyah Jakarta*, 1–21.
5. Fitriana, F., Sari, W. P., & Pramesti, D. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Pesisir Dalam Mengatasi Limbah Tambak Udang Melalui Rehabilitasi Lingkungan. *Jmm (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(6), 4814–4825. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i6.11154>
6. Harefa, M. S., Pangaribuan, B. J. T., S, A., & K., A. (2020). Analisis Konservasi Ekosistem Hutan Mangrove Daerah Pesisir Kampung Nipah Kecamatan Perbaungan. *Jurnal Georaflesia: Artikel Ilmiah Pendidikan Geografi*, 5(2), 112. <https://doi.org/10.32663/georaf.v5i2.1529>
7. Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2016). *Potensi Besar Perikanan Tangkap Indonesia*. Retrieved From [https:// setkab.go.id/potensi-besar-perikanan-tangkapindonesia/](https://setkab.go.id/potensi-besar-perikanan-tangkapindonesia/), On 12 Juni 2019
8. Iswari, I. G. A. Y., Indrayani, L., & Suwena, K. R. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Di Dusun Pangkung Dedari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 11(2), 509–516.
9. Kristiyanti, M. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Melalui Pendekatan Iczm (Integrated Coastal Zone Management). *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank (Sendi\_U) Ke-2 Tahun 2016 Kajian Multi Disiplin Ilmu Dalam Pengembangan Ipteks Untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (Pnsb) Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Global*, 752–760.

10. Kusmastanto, T. (2000). *Pemberdayaan Sumber Daya Kelautan, Perikanan Dan Perhubungan Laut Dalam Abad Xxi*. Retrieved From [Http://Www.Lfip.Org/English/Pdf/Bali-Seminar/Pemberdayaan%20Sumber%20daya%20kelautan%20-%20Tridiyo%20kusumastanto.Pdf](http://Www.Lfip.Org/English/Pdf/Bali-Seminar/Pemberdayaan%20Sumber%20daya%20kelautan%20-%20Tridiyo%20kusumastanto.Pdf), On 12 Juni 2019
11. Lehan, A. V., Utami, T. A., & Ningsih, P. W. (2023). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 6(2), 961–972. <https://doi.org/10.31539/Jks.V6i2.4856>
12. Limbong, C., Samsuri, & Ahmad, A. G. (2023). Strategy To Strengthening Forest Farming For Sustainable Mangrove Forest Management In The Coastal Area, Deli Serdang, Indonesia. *Journal Of Sylva Indonesiana*, 6(01), 29–43. <https://doi.org/10.32734/Jsi.V6i01.9154>
13. Mahmud, M., & Wahyudi. (2014). Pemanfaatan Vegetasi Mangrove Sebagai Obat-Obatan Tradisional Pada Lima Suku Di Papua. *Biota : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Hayati*, 19(1), 1–8. <https://doi.org/10.24002/Biota.V19i1.448>
14. Maulidia, V., Akbar, A. A., Jumiati, J., Arifin, A., & Sulastri, A. (2022). The Value Of Mangrove Ecosystems Based On Mangrove Carbon Sequestration In West Kalimantan. *Journal Of Wetlands Environmental Management*, 10(1), 12. <https://doi.org/10.20527/Jwem.V10i1.279>
15. Megaputri, S. (2021). Manfaat Tanaman Mangrove Terhadap Pengobatan Diabetes. *Jurnal Medika Hutama*, 2(2), 480–483. [www.jurnalmedikahutama.com](http://www.jurnalmedikahutama.com)
16. Millward, D. J. (2017). Nutrition, Infection And Stunting: The Roles Of Deficiencies Of Individual Nutrients And Foods, And Of Inflammation, As Determinants Of Reduced Linear Growth Of Children. *Nutrition Research Reviews*, 30(1), 50–72. <https://doi.org/10.1017/S0954422416000238>
17. Palijsama, F. (2022). Perkembangan Teori Sosial Dan Teoritik Penanganan Masalah Sosial Di Indonesia. *Hipotesa*, 16(2), 12–20.
18. Phelan, A. (Any), Ruhanen, L., & Mair, J. (2020). Ecosystem Services Approach For Community-Based Ecotourism: Towards An Equitable And Sustainable Blue Economy. *Journal Of Sustainable Tourism*, 28(10), 1665–1685. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1747475>
19. Puspitasari, Y. E., Hardoko, H., Sulistiyati, T. D., Fajrin, A. N., & Tampubolon, H. O. (2022). Identifikasi Senyawa Fitokimia Dari Daun Mangrove Sonneratia Alba Dan Analisis In Silico Sebagai Antidiabetes. *Jurnal Perikanan Dan Kelautan*, 27(2), 241. <https://doi.org/10.31258/Jpk.27.2.241-248>
20. Raharja, U. M. P., Waryana, W., & Sitasari, A. (2019). The Economic Status Of Parents And Family Food Security As A Risk Factor For Stunting In Children Under Five Years Old In Bejiharjo Village. *Ilmu Gizi Indonesia*, 3(1), 73. <https://doi.org/10.35842/Ilg.V3i1.130>
21. Rahmah, W., Nandini, E., & Siregar, K. A. A. K. (2021). Potensi Tanaman Mangrove Sebagai Agen Antikanker: Literature Review. *Jurnal Penelitian Farmasi Indonesia*, 10(1), 12–16. <https://doi.org/10.51887/Jpfi.V10i1.1168>
22. Rosyada, A., Anwari, M. S., & Muflihati. (2018). Pemanfaatan Tumbuhan Mangrove Oleh Masyarakat Desa Bakau Besar Laut Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah. *Jurnal Hutan Lestari*, 6(1), 62–70.
23. Sonia, P. & Susilawati. (2022). Literature Review: Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. *Jurnal Health Sains*, 3(7), 896–904. <https://doi.org/10.46799/Isa.V3i7.457>
24. Sugito, T., Sulaiman, A. I., Sabiq, A., Faozanudin, M., & Kuncoro, B. (2019). Community Empowerment Model Of Coastal Border Based On Ecotourism. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 32(4), 363. <https://doi.org/10.20473/Mkp.V32i42019.363-377>
25. Suharto, E. (2017). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Pt Refika Aditama.
26. Sulandjari, K., Abubakar, A., & Sari, D. A. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyuluhan Pengolahan Buah Mangrove Sebagai Sumber Pendapatan Alternatif Masyarakat Pesisir Karawang. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(3), 1087. <https://doi.org/10.37905/Aksara.7.3.1087-1096.2021>
27. Sunantri, Y., & Yayan, H. (2021). Strategi Pengembangan Pariwisata Melalui Perencanaan ”Rest Area” Berbasis Masyarakat Di Kawasan Pesisir Pantai Desa Sebung Perh-Kabupaten Bintan. *Jurnal Bahtera Inovasi*, 5(1), 42.

28. Suryani, A. S. (2019). Pengaruh Kebijakan Pemerintah Dan Peran Serta Masyarakat Terhadap Kualitas Lingkungan Pesisir Benoa Badung Bali. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 10(2), 171–187. <https://doi.org/10.22212/Aspirasi.V10i2.1231>
29. Susanti, & Mona, S. (2021). Pengetahuan Masyarakat Mengenai Manfaat Tanaman Mangrove Sebagai Obat Tradisional. *Jurnal Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan Indonesia*, 1(2), 15–24. <https://doi.org/10.55606/Jikki.V1i2.844>
30. Sutarto, D. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Keluarga Persepektif Gender. *Jurnal Trias Politika*, 2(2), 267. <https://doi.org/10.33373/Jtp.V2i2.1473>
31. Voyer, M., Schofield, C., Azmi, K., Warner, R., Mcilgorm, A., & Quirk, G. (2018). Maritime Security And The Blue Economy: Intersections And Interdependencies In The Indian Ocean. *Journal Of The Indian Ocean Region*, 14(1), 28–48. <https://doi.org/10.1080/19480881.2018.1418155>
32. Yusri, I., Purwanto, U. S., Muhaimin, & Yusri. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Penanaman Dan Pengelolaan Mangrove Di Pulau Untung Jawa—Kepulauan Seribu. *Jurnal Pemberdayaan Komunitas Mh Thamrin*, 4(2), 28–41. <https://doi.org/10.37012/Jpkmht.V4i2.943>